

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS UNIT  
USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

AGUNG BAGUS WIBOWO

53154140



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021/1441 H

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS UNIT  
USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

AGUNG BAGUS WIBOWO

53154140



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021/1441 H

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Bagus Wibowo  
NIM : 53154140  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebun Bangun/ 19 November 1997  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Alamat : Jl. Asahan Km.13 Emplasmen Kebun Bangun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul :“**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)**”, benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Maret 2021  
Yang membuat pernyataan

**AGUNG BAGUS WIBOWO**  
**NIM : 53154140**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS UNIT USAHA SYARIAH BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Oleh :

AGUNG BAGUS WIBOWO

Nim. 53154140

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 13 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA

NIP. 197601262003122003

Pembimbing II



Dr. Kamilah, SE. Ak. Msi, CA

NIP.197910232008012014

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIP.197705312005012007

## LEMBAR PENGESAHAN

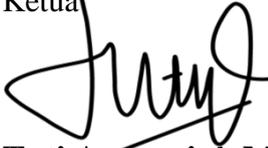
Skripsi berjudul "PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)" saya Agung Bagus Wibowo Program studi Perbankan Syariah telah sidang munaqosah dalam sidang munaqasah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 22 Maret 2021

Panitia Sidang Muanqasyah Skripsi

Proram Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



**Tuti Anggraini, MA**

NIP.197705312005012007

Sekretaris



**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. E.I**

NIP. 198904262019031007



**Dr. Marliyah, MA**

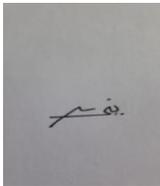
NIP. 197601262003122003

Anggota,



**Dr. Kamilah, SE. Ak. Msi. CA**

NIP.197910232008012014



**Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA**

NIP. 197907012009122003



**Mawaddah Irham, M. E.I**

NIB. 1100000092

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Islam UIN-SU**

**Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag**

NIP. 197604232003121002

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara). Dengan tujuan untuk mengetahui Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah (studi kasus unit usaha syariah Bank pembangunan daerah Sumatera Utara), untuk mengetahui apakah komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah (studi kasus unit usaha syariah bank pembangunan daerah Sumatera Utara), untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah (studi kasus unit usaha syariah Bank pembangunan daerah Sumatera Utara). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Alat ukur kinerja perusahaan dalam penelitian ini adalah menggunakan profitabilitas ROA yang diambil dari laporan keuangan UUS BPD tahun 2014 – 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin besar proporsi dewan komisaris independen fungsi pengawasan perusahaan akan terlaksana dengan baik sehingga kinerja keuangan perusahaan juga meningkat. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi proporsi anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun semakin meningkat. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tidak menjamin adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

**Kata Kunci: Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kinerja keuangan.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Prof Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.
2. Bapak Dr. H Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M. Ag selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, MS selaku Dosen Pembimbing 1 yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa serta memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kamilah, SE. AK, Msi, CA selaku Dosen Pembimbing 2 yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa serta memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
8. Adik – adik dan teman – teman saya yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Skripsi ini. Dan semoga tulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Januari 2021  
Penulis,

**Agung Bagus Wibowo**

**NIM : 53154140**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teoritis .....	12
1. Kinerja.....	12
a. Pengertian Kinerja .....	12
b. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan.....	14
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan .....	15
d. Manfaat Penilaian Kinerja.....	16
e. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan .....	17
f. ROA ( <i>Return On Asset</i> ).....	20
g. Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan .....	22
h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	23
2. Agency Theory .....	24
3. Tata Kelola Perusahaan.....	25
4. Bank Pembangunan Daerah .....	35
B. Pembahasan Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	39

B. Populasi dan Sampel.....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Defenisi Oprasional Variabel .....	40
F. Analisis Data .....	41

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Perusahaan.....	46
B. Analisi Statistik Deskriptif.....	47
1. Uji Normalitas.....	49
2. Uji Multikolinearitas.....	52
3. Uji Heteroskedastisitas .....	53
4. Uji Autokolerasi.....	53
5. Analisis Regresi Slinier Berganda .....	54
6. Uji Parsial (Uji-t).....	55
7. Uji F.....	56
8. Koefisien Determinasi .....	57
C. Pembahasan.....	57

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

B. Kesimpulan.....	60
C. Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

#### **LAMPIRAN ..... 63**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya yang didasarkan atas kecatatan, pengalaman dan keunggulan serta waktu.<sup>1</sup> Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Dalam kenyataannya, perusahaan sesungguhnya hanya mengharapkan prestasi atau hasil kerja terbaik dari karyawannya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap penyandang dana dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.<sup>2</sup>

Salah satu cara mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan adalah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan GCG dalam dunia perbankan telah diatur dalam PBI no.11/33/PBI/2009 bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Ditambah

---

<sup>1</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar Kunci Keberhasilan*, (Jakarta : Haji Mas Agung 2001), h.34

<sup>2</sup>Nuswandari Cahyani, *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Oktober 2009, h.70-84.

lagi dengan adanya OJK pada 2011 yang memiliki otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal. Aturan ini dikeluarkan dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan GCG didalam industry perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha.<sup>3</sup> Perusahaan yang menerapkan GCG mempunyai profitabilitas yang tinggi. Rata-rata ROA (*Return On Asset*) di 30 perusahaan dengan GCG terbaik versi IICD mencapai 23%, ini jauh lebih baik daripada 67 perusahaan lain yang hanya <15%.<sup>4</sup> Dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia penerapan GCG dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Pemangku kepentingan yang paling penting dalam kasus keuangan Islam adalah islam itu sendiri. Jika bank tidak melakukan dengan baik, orang-orang akan menganggap sistem Islam menjadi tidak selaras dengan dunia modern yang mungkin akan mencoba untuk menyalahkan Islam untuk kinerja yang buruk dari bank yang meskipun sebenarnya Islam itu sendiri tidak ada hubungannya dengan itu.<sup>5</sup>

Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance* hingga penerapan GCG sangat penting pada bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah difatwakan oleh DSN. Bank-bank syariah diharapkan harus berada digaris terdepan dalam implmentasi *Good*

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri BUMN No. Per- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011

<sup>4</sup>Royman Sipayung, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan 2012, h.4

<sup>5</sup>M.Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate governance in Islamic banking*, (Jakarta: IRTI 2002), h.24

*Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sebaliknya *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer bank syariah harus lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan prinsip syariah.

Beberapa kasus konflik tata kelola perusahaan di Indonesia dapat menjadi contoh dimana banyak pihak baik pengamat ekonomi, investor, maupun kalangan akademisi yang mengatakan lamanya proses pemulihan dari krisis prekonomian pada tahun 1997-1998 adalah karena lemahnya penerapan GCG di kalangan perusahaan. Bahkan hampir 10 tahun (1998-2008) implementasi GCG di Indonesia ternyata belum membuahkan hasil maksimal meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) sebagai bentuk untuk menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia.

Penyimpangan GCG ini juga terjadi pada sektor perusahaan lainnya. diantaranya yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Beberapa kasus pelanggaran dan penyimpangan GCG di**  
**Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Pelanggaran GCG</b>
2001	Bank BCA	Insider Trading
2002	Bank Lippo	Skandal Laporan Keuangan Ganda
2004	Bank Global	Pembekuan Usaha
2011	Citibank	Pembobolan Dana
2011	(BRTI)	Pemberhentian SMS Premium secara sepihak
2011	PT Elnusa	Pembobolan Dana

*sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber media*

Banyaknya kasus penyimpangan GCG yang terjadi tersebut dapat dilakukan bahwa GCG di Indonesia sedang berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hasil survey ACGA (*Asia Corporate Governance Association*) pada 11 negara terhadap pelaku bisnis asing di asia tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai negara terendah dalam bidang *Corporate Governance*.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**

**Rating Corporate Governance Quality**

No.	Negara	2007	2010	2012
1	Singapura	65	67	69
2	Hongkong	67	65	66
3	Thailand	47	55	58
4	Japan	52	57	55
5	Malaysia	49	52	55
6	Taiwan	54	55	53
7	India	56	48	51
8	Korea	49	45	49
9	China	45	49	45
10	Filipina	41	37	41
11	Indonesia	37	40	37

Keterangan : Semakin rendah skor, GCG semakin buruk

Sumber : *CG Watch market socresreport by ACGA, 2012*

ACGA merupakan organisasi keanggotaan nirlaba independen yang didedikasikan untuk bekerjasama dengan investor, perusahaan dan para regulator dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efektif di seluruh asia. selain survey ACGA, laporan ASEAN *Corporate Governance Skorcard* tahun 2012-2013, hasil kerjasama antara ASEAN *capital market* dan ADB, menunjukkan implementasi GCG perusahaan publik di Indonesia ternyata masih saja rendah. Salah satu kasus masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia yaitu kasus PT. Central Korporindo Internasional Tbk. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam Umum PT. Central Korporindo Internasional Tbk, berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti yaitu : telah terjadi perubahan penggunaan dana hasil penawaran Umum PT. Central Korporindo Internasional Tbk, yang semula akan digunakan untuk membel alat-alat berat untuk keperluan pengolahan batu bara sebear

<sup>6</sup>Alisanda, “Pengaruh Penerapan GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Emiten di BEI Tahun 2010-2011”, <https://digilib.mercubuana.ac.id> Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2019.

Rp.2.500.000.000,00 dan untuk pembelian sarana transportasi darat untuk keperluan perdagangan batubara sebesar Rp.1.700.000.000,00 diubah penggunaannya untuk modal kerja PT. Central Korporindo Internasional Tbk. Perubahan penggunaan dana tersebut belum memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip akuntabilitas. Dana hasil dari penawaran umum harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama, artinya adalah perusahaan tidak boleh melakukan perubahan alokasi dana secara sepihak. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, maka PT. Central Korporindo Internasional Tbk berkewajiban untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam selaku otoritas pasar modal dan meminta persetujuan kepada RUPS terhadap perubahan penggunaan hasil dari penawaran umum tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah direksi PT. Central Korporindo Internasional Tbk tidak meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu terhadap *corporate action* yang akan dilakukan. Ketidapatuhan tersebut akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaan, penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Umer Chapra dan Ahmad yang mana 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survey tata kelola yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah yang ada di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan melakukan rush money ke bank lain jika terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam operasional bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, penerapan GCG di bank syariah merupakan keharusan agar dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Indrasurya & Ivan Yustiavanda, *Penerapan GCG Mengeampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana 2008), h.177.

**Tabel 1.3**  
**UUS BPD dalam penerapan GCG**

UUS BPD	2014	2015	2016	2017	2018
UUS BPD Sumut	2%	3%	4%	0,24%	-0,79%
UUS BPD DKI	2,95%	3,15%	2,1%	0,89%	3,15%
UUS BPD Riau	2%	2%	1,7%	1,7%	1,6%
UUS BPD Jambi	3,58%	4,14%	3,14%	2,43%	1,5%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ROA masing-masing UUS yang disetiap tahunnya mengalami naik turun yang tidak stabil tampak jelas ditahun 2015 dan 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa profitabilitas masing-masing bank menurun, yang seharusnya BPD menjadi ujung tombak pembangunan di daerah yang memiliki tujuan menjadi bank terkemuka di daerah, membantu percepatan pembangunan dan menolong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai bank sehat elit dan rakyat, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah dan pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil menengah.

Selain itu pelanggaran *good corporate governance* Pada Bank Sumut yaitu terjadinya kekosongan dewan komisaris pada tahun 2015 sampai 2016 hal ini mensinyalir keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan dalam memperburuk dan dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran GCG oleh pemilik dan pengurus PT Bank Sumut. Pembiaran pelanggaran tersebut dituding merupakan konspirasi antara OJK dengan pemilik dan pengurus bank untuk kepentingan dan keuntungan pribadi pihak tertentu. Selain itu pemlihan dwan komisaris dilakukan oleh ojk sepihak

Dewan komisaris merupakan yang penting organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas pengurusan Bank oleh Direksi, pengawasan *good corporate governance* (GCG--tata kelola perusahaan yang baik), terhadap penerapan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan

bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi<sup>8</sup>

Pelnggaran yang terjadi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG--tata kelola perusahaan yang baik), yang berdampak pada tingkat kesehatan bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat maupun nasabah.<sup>9</sup>

Penerapan *good corporate governance* menjadi pertimbangan yang sangat besar atas kepercayaan nasabah suatu bank syariah. Semakin bagus penilaian indeks komposit GCG berarti bahwa sumber daya yang ada dalam bank tersebut baik. Penerapan pengukuran indeks komposit *good corporate governance* juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai bank syariah itu sendiri. Dengan adanya penilaian tersebut seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena memiliki tanggung jawab dan standar kerja yang harus dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya proporsi dewan komisaris yang tinggi maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi proporsi untuk dewan komisaris independen maka komisaris independen akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa komisaris independen dapat berpikir lebih obyektif dibanding dewan komisaris dan direksi.

Semakin banyak pemonitor akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan *agency cost*. Pengawasan komisaris terhadap manajemen umumnya tidak efektif dikarenakan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis, kandidat dewan komisaris sering dipilih sendiri oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani mengkritik kebijakan manajemen.

Dalam menjamin terciptanya tata kelola yang baik maka komisaris independen diharuskan mempunyai kredibilitas, profesional, integritas yang baik.

---

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2009), hlm.20

<sup>9</sup> Indra surya & Ivan Yustiavanda, *Penerapan GCG Mengeampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana 2008), h.177

Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, memastikan perusahaan mematuhi hukum perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan di perusahaan, sehingga perusahaan perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik.

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan serta implementasi dari *good corporate governance*. Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat.

Keberadaan komite audit akan memastikan bahwa perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Dengan demikian maka semakin banyak jumlah komite audit akan mempengaruhi kinerja internal perusahaan sehingga akan membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik.

kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang

saham.

Dengan adanya contoh kasus diatas, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektifitas penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lain.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam proses menerapkan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan dan mengemukakan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Penerapan GCG masih terdapat skandal yang mana fungsi dari *Good Corporate Governance* adalah meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Penerapan *good corporate governance* menjadi pertimbangan yang sangat besar atas kepercayaan nasabah suatu bank syariah
3. Pelanggaran GCG masih terjadi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tetap terfokus pada permasalahan yang ingin dibahas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut: Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)

## **D. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, karena perumusan masalah akan mempermudah dalam melakukan penelitian dan dalam mencari jawaban yang lebih akurat. Serta dengan adanya perumusan masalah ini akan dapat membantu penyusunan dalam skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)”.?.
2. Apakah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)”.?.
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)”.?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan:

1. Untuk mengetahui Apakah Dewan Komisaris berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)
2. Untuk mengetahui Apakah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)
3. Untuk mengetahui Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kinerja keuangan perusahaan
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi syariah
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai pengetahuan baru dan wawasan dibidang perbankan dan juga memberikan gambaran sesungguhnya tentang pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja suatu perusahaan.
- b. Bagi perusahaan agar dapat dijadikan acuan perusahaan untuk meningkatkan fungsi masing-masing organ perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas GCG dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menambah bukti empiris dari penelitian sebelumnya tentang GCG yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Kinerja

###### a. Pengertian Kinerja

Dapat kita ketahui jika masing-masing perusahaan pasti dapat meninjau kinerja dari sebuah perusahaan. Masing-masing perusahaan tentunya selalu melakukan peninjauan kinerja dari perusahaan dalam periode tertentu. Kegiatan ini yang sering disebut juga kinerja perusahaan. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja seseorang atau kelompok orang dalam organisasi dalam suatu periode waktu tertentu, sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi, dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.<sup>1</sup> Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dinamis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara maksimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap penyandang dana dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kinerja adalah semua yang dapat dicapai. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*, yang bermakna prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja mencerminkan seberapa jauh sebuah keberhasilan suatu pekerjaan telah dicapai. Lebih lanjut kinerja manusia merupakan fungsi dan tingkat kemampuan, sikap dan derajat motivasinya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang, sebagai prestasi kerja yang dihasilkan karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

---

<sup>1</sup>Fahmi Irham, *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2010), h.10.

<sup>2</sup>*Ibid*, h.2.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.<sup>3</sup> Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan atau dilakukan karyawan.<sup>4</sup> Kinerja perusahaan adalah sebuah hasil yang dibuat oleh pihak manajemen secara terus menerus. Dalam hal ini, hasil yang dimaksud merupakan hasil dari keputusan banyak individu.<sup>5</sup>

Dari penjelasan menurut para ahli diatas tentang kinerja perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan adalah sebuah hasil dari proses bisnis perusahaan yang menunjukkan nilai keberhasilan dari sebuah usaha yang bisa diukur dengan informasi keuangan maupun non keuangan. Kinerja secara konseptual dapat dilihat dari dua sisi yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja dari perseorangan anggota organisasi atau karyawan perusahaan, sedangkan kinerja organisasi adalah total hasil kerja yang dicapai oleh organisasi. Pada dasarnya kinerja individu dan kinerja organisasi saling terkait satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi tentu saja sangat dipengaruhi sumber daya yang terdapat didalam organisasi, termasuk anggota yang berperan aktif sebagai pelaku yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pencapaian kinerja organisasi merupakan agregasi atau penjumlahan kinerja seluruh divisi yang berada dalam organisasi, sedangkan pencapaian kinerja divisi merupakan agregasi kinerja dari seluruh individu yang tercakup didalamnya.<sup>6</sup>

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor peneringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG telah

---

<sup>3</sup>Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Peredagangan Bebas Dunia* (Yogyakarta: BPF 1999), h.2

<sup>4</sup>Robert L. Mathis dan Jhon h. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat 2002), h.78

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 65

<sup>6</sup>Arini T, *Panduan Praktis Menyusun KPI*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, cetakan ke 2 2005), h.10-11.

menerapkan GCG dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Secara teoritis praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Peranan penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang sudah ketat sekali. Penerapan GCG yang berintikan pada budaya korporasi adalah merupakan sikap profesionalisme yang beretika dan bernilai tinggi, sehingga semua kekuatan manusia korporasi tidak lagi melakukan politik praktis didalam perusahaan, melainkan bersatu padu untuk meningkatkan kualitas perusahaan menjadi kuat, kokoh, dan lebih sehat serta dapat mengembangkan perusahaan.<sup>7</sup>

#### **b. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan**

Dalam rangka menilai tercapai tidaknya tujuan perusahaan, maka diperlakukan penilaian menyeluruh, salah satunya dengan mengetahui kinerja keuangan bank ataupun suatu perusahaan. sebagaimana pendapat Warsono ”mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat dirumuskan sebagai suatu perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ataupun bank yang dicapai dengan memanfaatkan aset produktifnya dengan nilai yang diharapkan oleh pemilik aset tersebut”.<sup>8</sup>

Pengukuran kinerja keuangan melalui laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan tersebut, sehingga untuk selanjutnya kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Hal ini tentunya dapat mengambil informasi bagi pengambil keputusan, sehingga kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan.

Mulyadi mengatakan “bahwa menilai kinerja bertujuan memotivasi

---

<sup>7</sup>Prasetyo Widyono Iswara, *Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, february 2012 h. 29.

<sup>8</sup> Warsono. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. (Banyu Media Publishing. Malang:2002), hlm.231

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya agar dapat menghasilkan tindakan dan hasil yang di inginkan”.

### **c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan**

Manfaat dari pengukuran kinerja ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>(1) Memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan; (2) Dapat digunakan untuk mengukur suatu prestasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan; (3) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja manajemen; (4) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan penanam modalnya agar dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.

Pencapaian kinerja yang baik itu tergantung dari individual ataupun kelompok yang terus dibuat oleh manajemennya. Stiap keputusan yang diambil berdampak pada keuangan yang menyebabkan semakin membaik atau memburuknya suatu kinerja perusahaan tersebut.

Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah:

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan itu.

#### **d. Manfaat Penilaian Kinerja**

Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
6. Penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu:
  - a. Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengayaan pekerjaan, penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan.
  - b. Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, honorarium lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan bonus), kompensasi tidak langsung (asuransi kecelakaan, asuransi hari

tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit), dan kompensasi non keuangan (ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor yang istimewa, dan tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang menerima penghargaan tersebut.

#### **e. Pengukuran Kinerja keuangan Perusahaan**

Pengukuran kinerja adalah merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran inilah yang kemudian akan memberikan informasi tentang prestasi dari pelaksanaan strategi bisnis perusahaan. Informasi ini akan dijadikan landasan bagi perbaikan kinerja bisnis baik dalam menata ulang strategi yang ada maupun aktivitas pengendalian sehingga nantinya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.<sup>9</sup>Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pertimbangan bahwa perlu adanya sistem evaluasi yang objektif terhadap organisasional. Selain itu, dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang objektif untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan kepada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada. Secara garis besar pengukuran kinerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan

---

<sup>9</sup>Yuwono, Sukarno, M. Ichsan, *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), h.21.

informasi-informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari sisi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana. Kinerja keuangan perusahaan yang dilihat secara umum adalah:

- 1) Return dari sebuah saham merupakan salah satu tolak ukur kinerja saham sehingga para investor selalu berusaha memaksimalkan return yang akan dihasilkan setelah perhitungan factor risiko.
- 2) Reaksi pendapatan terhadap perubahan kebijakan yang diambil oleh manajemen.

Informasi keuangan yang sering digunakan adalah laporan laba rugi dan neraca. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek earning atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan penilaian tersebut, aspek earning merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas merupakan elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja keuangan bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kas, modal, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>10</sup> Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik, serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank.

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu lembaga maka dapat digunakan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Analisis Rasio Keuangan Lembaga Keuangan

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang

---

<sup>10</sup>Sofyan safri harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), h.304

paling populer dan banyak digunakan. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja lembaga keuangan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan lembaga yang bersangkutan.<sup>8</sup> Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, sementara yang lain bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik.<sup>11</sup> Berikut ini adalah jenis-jenis rasio keuangan:

1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivasinya.
3. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.<sup>12</sup>

#### b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional KJKS yang digunakan untuk mengukur kemampuan KJKS dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*)

---

<sup>11</sup> Subramanyam, John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Dewi Yanti, Jilid I (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 43.

<sup>12</sup> Agus sartono, *Manajemen Keuangan Aplikasi dan Teori*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2010), 122.

yang dihasilkan oleh KJKS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

*Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja KJKS seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. KJKS tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.<sup>13</sup>

#### **f. ROA (*Return On Asset*)**

Kinerja dalam penelitian ini diukur dengan ROA (*Return On Asset*). ROA atau pengembalian atas aktiva merupakan sebuah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan laba pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.<sup>14</sup> Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini asset yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat kiranya diukur aktivitas asset tersebut sehingga menghasilkan laba yang diinginkan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9 tahun 2007 menyatakan bahwa *Return On Asset* merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah.

Kriteria penilaian peringkat untuk ROA adalah:<sup>15</sup>

Peringkat 1 = > 1.5%

---

<sup>13</sup> Zainul Arif, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 59.

<sup>14</sup> Arfan ikhsan, et.al, *Analisa Laporan Keuangan* (Medan: Madenatera 2016), h.81

<sup>15</sup> Lampiran SE-BI No.9/24/Dpbs, 2007:22

Peringkat 2 = 1.25% <ROA <1.5%

Peringkat 3 = 0.5% <ROA <1.25%

Peringkat 4 = 0% <ROA <0.5%

Peringkat 5 = ROA <0%

Menurut PBI 9/1/PBI/2007 pasal 8, peringkat factor finansial ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industry keuangan.
- 2) Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industry keuangan.
- 3) Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industry keuangan.
- 4) Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitive dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industry keuangan.
- 5) Peringkat 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong buruk dan sangat sensitive dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industry keuangan.

Semakin besar ROA mensinyalir bahwa kinerja perusahaan semakin meningkat karena tingkat kembalian investasi (*return*) yang semakin besar. Nilai ROA yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan berbanding asset yang tinggi. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola asset untuk meningkatkan pendapatan menekan biaya. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total asset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan asset-assetnya untuk menghasilkan laba.

ROA dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Return On Asset (ROA)}: \frac{\text{laba bersih}}{\text{total asset}}$$

#### **g. Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan**

Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah:

- 1) Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya saat ditagih.
- 2) Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keungan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
- 4) Mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

#### **h. Manfaat Pengukuran Kinerja Perusahaan**

Manfaat pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengukur prestasi kerja yang dicapai oleh organisasi dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Selain digunakan untuk menilai kinerja organisasi secara keseluruhan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

- 3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- 5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan.<sup>16</sup>

Sistem pengukuran kinerja yang diterapkan mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku individu didalam maupun diluar organisasi. Sistem ini mampu mempermudah manajemen perusahaan. Yang diharapkan dalam pengukuran kinerja adalah umpan balik kepada manajemen organisasi terhadap pelaksanaan strategi bisnis.<sup>17</sup>

#### **i. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

##### 1) Efektifitas dan Efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

##### 2) Otoritas (wewenang)

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang seorang anggota organisasi kepada anggota organisasi lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.

##### 3) Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>16</sup>Amiyulianthy Rafrini, *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia*, Jurnal Liquidity Vol.1, No.2, Januari 2015 h.91-98.

<sup>17</sup>Mulyadi dan Setiawan, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen edisi kedua*, (Jakarta: Salemba 2010), h.357.

#### 4) Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya fikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.<sup>18</sup>

Kinerja perusahaan tak lain dikerahkan dari pengendalian perusahaan secara internal. Belakangan ini, semakin banyak perusahaan kecil, besar, bahkan menengah yang saling berkembang. Beberapa perusahaan juga intens memantau bagaimana perkembangan kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam perusahaan, tetapi dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kinerja perusahaan dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem GCG dalam kinerja perusahaan.

## 2. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Pada awalnya, teori agensi berkaitan dengan masalah kepemilikan perusahaan melalui pembelian saham. Dalam manajemen keuangan, teori agensi membahas adanya hubungan agensi yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Hubungan agensi seperti ini rawan konflik, yaitu konflik kepentingan pribadi (konflik agensi). Konflik ini terjadi karena pemilik modal berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, sedangkan manajer cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk memaksimalkan keuntungan yang sering bertentangan dan cenderung mengutamakan kepentingan sendiri.

Teori agensi berkembang dalam dua aliran, yaitu *positivism* dan *principal agent*. Keduanya menggunakan dasar yang sama, yaitu adanya kontrak prinsipil dan agen. *Positivism* difokuskan pada situasi yang

---

<sup>18</sup>Suryadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE 1999), h. 43

menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara agen prinsipil dan cara pengelolaan konflik tersebut agar perilaku agen lebih terkendali pada kepentingan prinsipil. Secara umum pendapat itu hanya berfokus pada hubungan agen prinsipil atau pemilik manajer perusahaan yang *go public* dan pendekatannya tidak terlalu matematis. Menurut aliran *principal agent* masalah biaya agensi merupakan penerapan dibidang pendelegasian kepada pelaksana pekerjaan yang banyak dijumpai dalam kasus sehari-hari.<sup>19</sup>

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *Corporate Governance* dan manajemen laba. *Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

### 3. Tata Kelola Perusahaan

#### a. Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah prinsip-prinsip yang

---

<sup>19</sup>Jensen, M.C. and W.H. Meckling, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economic, maret 2013

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha.<sup>20</sup>

GCG adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam GCG adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandate, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari GCG, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Dalam GCG terdapat lima hal esensial yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sebagai sarana tanggungjawab publik dan menjaga kepercayaan terhadapnya. Kelima prinsip tersebut adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*). GCG sudah dikenal diterapkan dalam dunia perbankan sesuai yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri umum perbankan, diperlukan pelaksanaan GCG.

Dalam konteks Bank Syariah, corporate governance harus meliputi:

- 1) Sebuah kumpulan dari kesiapan organisasi dimana ada keselarasan tindakan manajemen dari Bank Syariah, sejauh yang di mungkinkan, yang sejalan dengan keinginan *stakeholder*.
- 2) Penyediaan insentif yang sesuai untuk oran-organ dari *governance* seperti Dewan Direktur, Dewan Syariah, dan Manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan *stakeholder* dan memfasilitasi

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri BUMN No. Per- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011

*monitoring* yang efektif, yang akan mendorong Bank Syariah untuk menggunakan sumber dayanya dengan lebih efektif.

- 3) Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup>

#### **b. Pengertian Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan juga pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain adalah sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan.

*Corporate Governance* ada karena telah terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Masalah keagenan ini dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return profitabilitas*.

*Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Dalam penelitiannya terdahulu mengungkapkan bahwa istilah *corporate governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal.

Untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang

---

<sup>21</sup>Nurul Huda & Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2009), h. 170.

menekannya pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

### c. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Jika suatu *corporate governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dengan baik dalam perusahaan dapat mendorong pemahaman antara pihak yang berkepentingan mengenai hak dan kewajiban, serta berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan yang diharapkan. Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

#### 1. *Transparancy* / Keterbukaan

*Transparancy* adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kesesuaian prinsip transparansi dengan Al-Qur'an:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا صِفَا سُئِنْتُمْ مَا كَذِبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَمَّا تَقُولُوا لِمَا كَذِبًا لِيُنْفَكُوا وَنَحْنُ أَلْمُونَ  
وَنُ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang kamu sebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (Q.S. An-Nahl : 116).*

Informasi yang benar dan tepat waktu mengenai perusahaan yang diberikan pada pemegang saham, dapat berperan dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh

bagian keuntungan perusahaan. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah:

- a. *Financial and Operating Result*
- b. Tujuan perusahaan
- c. Kepemilikan saham
- d. Isu-isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

## 2. *Accountability* / Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban Antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

Kesesuaian prinsip akuntabilitas terhadap Al-Qur'an:

اُنْكُرْ لِيْغَمًّا عَلٰى شَاكِرٍ لِّظَهْرِ بُوْكُمْ اَعْلَمِيْمًا هُوَ اَهْدٰ سَبِيْلًا

Artinya: *Katakanlah (Muhammad) "setiap orang sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al-Isra: 84).*

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- a. Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.

## 3. *Responsibility* / Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip ini adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dan sebagainya.

Kesesuaian prinsip pertanggungjawaban terhadap Al-Qur'an:

وَجَعَلُوا الْمَالِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اَنَا اَشْهَدُوْا اَخْلَقْتَهُمْ سَكْنًا نَّبِّشَ هَادَتْهُمْ وَيُسْتَلُوْنَ

Artinya: Dan mereka jadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka dimintai pertanggungjawaban. (Q.S. Az-Zukhruf : 19).

Prinsip ini diwujudkan dengan antara lain:

- a. Tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- b. Menyadari akan adanya tanggungjawab social.
- c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

#### 4. *Independency* / Kemandirian

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.

Kesesuaian prinsip kemandirian terhadap Al-Qur'an:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qasas : 26).

#### 5. *Fairness* / Kewajaran

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Kesesuaian prinsip kewajaran terhadap Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدِّبُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنَّا نَذِيبُ الْقُرْبَانَ بِمَا كَفَرُوا وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ عِظْكُمْ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :*Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl : 90).*

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa prinsip GCG pada dasarnya sama, yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan *stakeholder*, serta tanggung jawab legal manajemen.<sup>22</sup>

Penerapan prinsip GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Contoh dari penerapan GCG adalah system pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dan sebagainya.

#### **d. Unsur-Unsur Good Corporate Governance**

Unsur-unsur yang mendukung penerapan GCG pada perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham
- 2) Komisaris
- 3) Direksi
- 4) Komite Audit
- 5) Sekretaris perusahaan
- 6) Manajer dan karyawan

---

<sup>22</sup>Effendi, Muh. Arif, *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), h, 56

- 7) Auditor eksternal
- 8) Auditor internal
- 9) *Stakeholder* lainnya (pemerintah, kreditor, dll)

**e. Tujuan Good Corporate Governance**

Menurut Mr. Wolfensohn, Presiden *World Bank* telah menyimpulkan bahwa tujuan GCG adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa GCG bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan prinsip-prinsip GCG yang benar.

GCG memiliki tujuan untuk menciptakan struktur yang bisa membantu Bank dalam:

- 1) Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat.
- 2) Mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional, efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi.
- 4) Mendorong agar perusahaan mengambil tindakan keputusan dengan nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 dikatakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

- 1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 3) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

---

<sup>23</sup>Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Istitusi Keuangan Non-Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2018), h.118.

- 4) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab social BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
- 5) Meningkatkan investasi nasional.

#### **f. Manfaat Good Corporate Governance**

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, Antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS), tujuan dan manfaat *Good Corporate Governance* antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- 2) Mengurangi biaya yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu menetralsi risiko.

---

<sup>24</sup>Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Negara Indonesia Tbk*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, maret 2010.

<sup>25</sup>Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember, februari 2007

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajer mempunyai saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Adanya kepemilikan manajerial akan sangat berkaitan dengan *agency theory*. Dalam *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. Manajer sebagai *agent* dipercaya oleh pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* untuk menjalankan perusahaan dan memaksimalkan sumber daya agar tujuan perusahaan tercapai. Masalah dasar dalam *agency theory* adalah timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajer memiliki resiko untuk tidak dipilih lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer.

b. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Anggota komisaris diharapkan memiliki watak yang amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris Independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan

jumlah komisaris independennya sekurangkurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

#### c. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*.

Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki anggota paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Independen, sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### 4. Bank Pembangunan Daerah

Bank pemabngunan daerah adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya memberi kredit terutama jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Bank pembangunan daerah didirikan khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana (UU No.13 tahun 1962). Tujuan awal didirikannya BPD adalah untuk mengemban misi public sehingga orientasi profit tidak menjadi focus. BPD didirikan di daerah-daerah tingkat I dan saat ini terdapat 26 BPD diseluruh Indonesia. Sama halnya dengan bank umum lainnya yang menjalankan kegiatan yang sama, BPD juga menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau unit usaha syariah, unit kerja dari bank induknya yang masih dalam satu lingkup manajerial, kepemilikan dan satu ikatan hukum yang sama. Selain

menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir pemda, seperti dana realisasi APBD. Sehingga BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>26</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.31 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah. Pembukaan UUS harus masuk kedalam rencana kerja bank umum konvensional. Bank umum konvensional yang telah mendapatkan izin usaha, UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama bank umum konvensional dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan serta modal kerja minimal Rp.100.000.000.000 dalam bentuk tunai.

Tujuan dari BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi bank terkemuka di daerah.
- b. Membantu percepatan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d. Sebagai bank sehat elit dan rakyat.
- e. Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Sumber pendapatan daerah.
- g. Pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil menengah.

## **B. Pembahasan Terdahulu**

Hasil dari beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian, akan digunakan sebagai bahan referensi penelitian dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group 2015), h.102.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

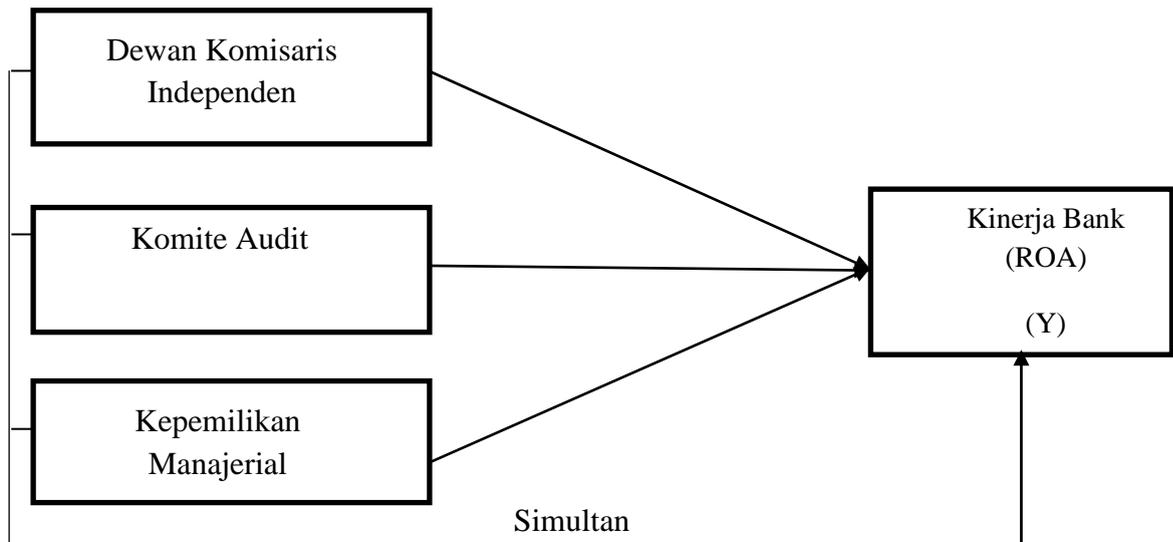
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penulis
Amalia Rosintan (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Variabel Independen: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, DPS, Komite Audit  Variabel Dependen: Kinerja Bank (ROA)	Menjelaskan bahwa penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan	Penulis menggunakan variabel independen yang berbeda.
Danang Febriyanto (2013)	Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial  Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Menjelaskan bahwa penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan	Penulis menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja perusahaan.
Roiman Sipayung (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan di BEI	Variabel independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, komite audit.  Variabel dependen: CFROA	Menjelaskan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.	Penulis meneliti penerapan GCG pada unit usaha syariah.

### C. Kerangka Penelitian

Adanya indikator dalam suatu perusahaan perbankan syariah yaitu dean komisaris, dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas syariah yang mempunyai pengaruh baik atau tidaknya terhadap kinerja keuangan yang ada dalam perbankan syariah. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan ROA. ROA digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan laba.

Kerangka konseptual diatas dapat digambarkan dalam skema hubungan antar variabel sebagai berikut:



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data/informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan persoalan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dari tahun 2014-2018. Data periode 2014-2018 dipandang cukup mewakili kondisi UUS BPD SUMUT dan indikator-inikator keuangan UUS BPD SUMUT pada periode ini. Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena bertujuan meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proksikan melalui *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* terhadap kinerja UUS BPD di Indonesia.

### B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah.<sup>1</sup>Populasi pada penelitian ini adalah UUS BPD di Indonesia. Berdasarkan ststistik perbankan syariah yang dipublikasikan OJK per-desember 2018 jumlah UUS BPD terdapat 14 bank.

Sampel merupakan himpunan sebagian dari unsur-unsur populasi yang memiliki ciri-ciri sama. Sampel merupakan bagian yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV.Alfabeta 2006) h.72

tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah UUS BPD SUMUT.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dari tahun 2014-2018. Data periode 2014-2018 dipandang cukup mewakili kondisi UUS BPD SUMUT dan indikator-inikator keuangan UUS BPD SUMUT pada periode ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.<sup>2</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan serta observasi dan wawancara untuk kesempurnaan penelitian. Data laporan keuangan tahun 2014-2018. Pengambilan data selama lima periode tersebut dimaksudkan untuk dilakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2014-2018.

### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*variable independen*) (X) adalah merupakan varibel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajer mempunyai saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011) h.224

### **b. Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

### **c. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*.

2. Variabel terikat (*variable dependen*) (Y) yaitu variabel yang nilai ditentukan oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja keuangan yang diukur dengan indikator ROA.

*Return on Asset* (ROA) atau pengembalian atas aktiva merupakan salah satu alat mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan laba.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah cara atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.

### **1. Uji Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda adalah hubungan yang memberikan penjelasan mengenai pola hubungan antar dua variabel, yaitu variabel dependen dan

independen. Digunakan apabila pengguna menggunakan atau memasukkan lebih dari satu variabel predictor. Pengujian hipotesis *corporate governance* terhadap kinerja digunakan dengan analisis regresi berganda.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menuji suatu model regresi linier yang terdapat korelasi antara kesalahan pengguna periode satu dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (tahun sebelumnya). Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji *Durbin-Watson* (DW), dan hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (DW). Berikut adalah keterangan untuk interpretasi statistic *Durbin-Watson*:

- 1) Jika  $d < dl$ , berarti terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika  $d > (4-dl)$ , berarti terdapat autokorelasi negatif.
- 3) Jika  $du < d < (4-dl)$ , berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 4) Jika  $dl < d < du$  atau  $(4-du)$ , berarti tidak dapat disimpulkan.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkorelasi kuat, berarti terjadi multikolinieritas. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) serta dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan *VIF*  $> 10$  dan untuk matriks korelasi adanya indikasi multikolinieritas dapat dilihat jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,90.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian

*error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan pengujian dilakukan dengan melihat diagram plotnya.

**d. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji *kolmogorov-smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal.

**3. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis menggunakan alat regresi berganda. Pemilihan regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = *Dewan Komisari*

X<sub>2</sub> = *Komite Audit*

X<sub>3</sub> = *Kepemilikan Manajerial*

**a. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Pada intinya koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *adjust*  $R^2$ , yang dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Jika nilai *adjust*  $R^2$  adalah sebesar 1 berarti flktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada factor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Nilai *adjust*  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika mendekati 1 berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *adjust*  $R^2$  semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

#### **b. Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial atau koefisien regresi yang dimaksud untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat pada kesamaan tersebut secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel dependen. Adapun langkah-langkah pengujian untuk uji t adalah sebagai berikut:

##### 1) Menentukan Hipotesis

Variabel bebas tidak berpengaruh apabila nilai koefisiennya sama dengan nol ( $H_0 : \beta_1 = 0$ ). Sedangkan variabel bebas akan berpengaruh apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan nol ( $H_0 : \beta_1 \neq 0$ ).

##### 2) Mencari $f_{tabel}$ dengan cara menentukan tingkat kesalahan dan derajat kebebasan.

Tingkat kesalahan yang dipakai adalah 5% dan derajat kebebasan adalah  $(df) = n - k$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah variabel independen yang digunakan.

##### 3) Menentukan kriteria pengambilan keputusan

$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$

Ha diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$

### c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )

$H_a$  diterima : berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

- 2) Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 ( $\alpha = 0.05$ )
- 3) Membandingkan  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$

Nilai  $f_{hitung}$  dapat dicari dengan umum:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)}$$

Keterangan:

$R^2$  : Koefisien determinasi

K : Banyaknya koefisien determinasi

N : Banyaknya observasi

- a) Bila  $f_{hitung} < f_{tabel}$  variasi independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
  - b) Bila  $f_{hitung} > f_{tabel}$  variasi independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 4) Berdasarkan probabilitas  
Dengan menggunakan nilai probabilitas,  $H_a$  akan diterima jika probabilitas kurang dari 0,05.
  - 5) Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Perusahaan**

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi. PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram.

Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah TebingTinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut. PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

## **B. Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian diolah dan dianalisis menggunakan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang akan diteliti. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan mengenai ukuran sampel yang diteliti, rata-rata (*mean*), simpangan baku

(*standard deviation*), maksimum, dan minimum dari masing- masing variabel.

*Mean* merupakan hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. *Standard Deviation* merupakan akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Standar deviasi mengukur seberapa luas penyimpangan atau penyebaran nilai data tersebut dari nilai rata-rata *mean*. Apabila standar deviasi dari suatu variabel tinggi, maka data dalam variabel tersebut semakin menyebar dari nilai *mean*- nya. Demikian pula sebaliknya, apabila standar deviasi suatu variabel semakin rendah, maka data dalam variabel tersebut semakin mengumpul pada nilai *mean*-nya. Maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan. Hasil pengolahan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2:

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
X1	1	0,20	0,57	0,3695	0,08503
X2	1	1,00	4,00	2,8750	0,67240
X3	1	0,00	0,34	0,0340	0,07612
ROA	1	-0,11	0,71	0,1381	0,15561
Valid N (listwise)	1				

Sumber : Hasil olah data, 2020

Hasil uji diatas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap variabel independen dan dependen. Sedangkan berikut ini merupakan penjelasan hasil uji statistik deskriptif pada variabel dependen :

- a. Nilai yang diperoleh secara keseluruhan untuk Dewan Komisaris (X1) memiliki nilai minimum 0,20 dan nilai maksimum 0,57 dengan nilai rata-rata 0,3695 dan nilai standar deviasi sebesar 0,08503. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat pola

penyebaran data yang mengumpul (homogen), sehingga menjadi variasi nilai komisaris independen yang tinggi.

- b. Nilai yang diperoleh secara keseluruhan untuk Komite Audit (X2) memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00 dengan nilai rata-rata 2,875 dan nilai standar deviasi sebesar 0,6724. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), sehingga menjadi variasi nilai komite audit yang tinggi.
- c. Nilai yang diperoleh secara keseluruhan untuk Kepemilikan Manajerial (X3) memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,34 dengan nilai rata-rata 0,0340 dan nilai standar deviasi sebesar 0,07612. Nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang menyebar (heterogen), sehingga menjadi variasi nilai kepemilikan manajerial yang tinggi.

Berikut ini merupakan penjelasan hasil uji statistik deskriptif pada variabel dependen :

Nilai yang diperoleh secara keseluruhan untuk *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai minimum -0,11 dan nilai maksimum 0,71 dengan nilai rata-rata 0,1381 dan nilai standar deviasi sebesar 0,15561. Nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang menyebar (heterogen)

Pengujian Asumsi Klasik Model

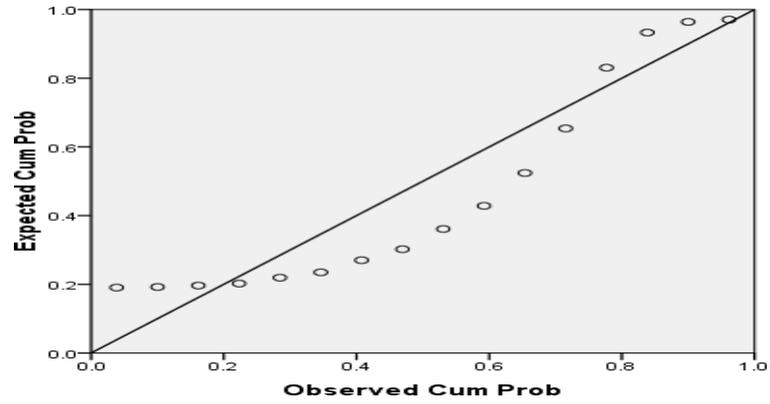
Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala multikolieneritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

### **1. Uji Normalitas**

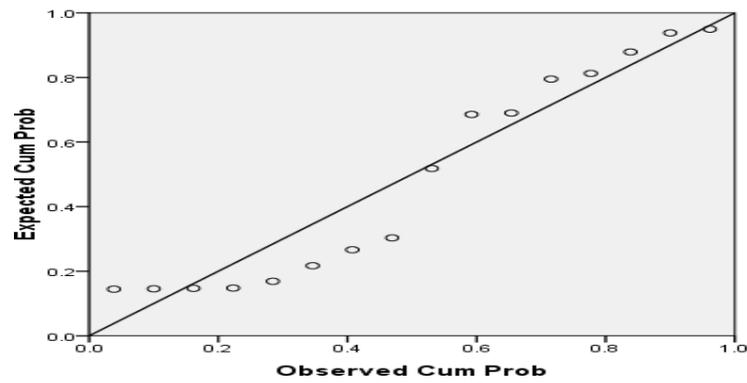
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik histogram dan uji

*kolmogorov-smirnov* (uji K-S). Hasil uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

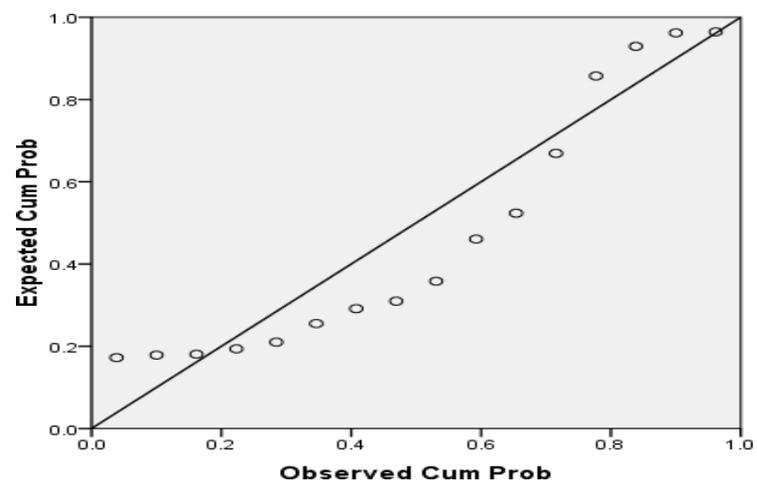
**Gambar 4.1 Uji Normalitas Variabel X1**



**Gambar 4.2 Uji Normalitas Variabel X2**



**Gambar 4.3 Uji Normalitas Variabel X3**



Pada normalitas data dengan kurva *Normal P-P Plot*, suatu variabel dikatakan telah berdistribusi normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.3 untuk masing-masing variabel penelitian telah berdistribusi normal karena penyebaran titik – titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal.

**Tabel 4.2**

**Uji Normalitas**

		X1	X2	X3
N		48	48	48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	11.9250	79.9833	91.9250
	Std. Deviation	2.14479	6.23342	6.60024
Most Extreme Differences	Absolute	.260	.299	.197
	Positive	.156	.225	.145
	Negative	-.260	-.299	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		.236	.331	.282
Asymp. Sig. (2-tailed)		.413	.258	.174

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2- tailed) Variabel X1* sebesar 0,413, Variabel X2 Sebesar 0,258 dan Variabel X3 sebesar 0,178. Dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $>0,05$ ), maka  $H_0$  diterima; yang berarti data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya tolerance value dan

besarnya VIF (Ghozali, 2016). Jika nilai tolerance value  $> 0,1$  dan  $< 1$  dan VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolonieritas**

Variabel Independen	ollinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Komisaris Independen	0,863	1,159	Tidak ada multikolinieritas
Komite Audit	0,866	1,155	Tidak ada multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial	0,996	1,004	Tidak ada multikolinieritas

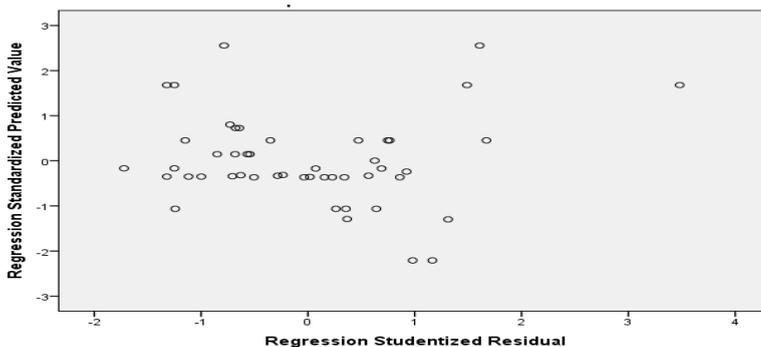
Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah  $< 10$ . Dengan nilai VIF dari variabel komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial kurang dari 10 dan nilai tolerance dari variabel komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial yaitu  $> 0,1$  atau  $< 1$ . Jadi berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatter plot.

**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.1 melalui grafik *scatter plot* maka dapat dilihat pola penyebaran data yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada *scatter plot* menyebar di atas dan di bawah dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dari pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

**4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Jika nilai *Durbin Watson* (DW hitung) lebih besar dari nilai  $du$  dan lebih kecil dari  $4 - dl$  sesuai tabel *Durbin Watson* (untuk jumlah sampel dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan) maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,675 <sup>a</sup>	,455	,418	,11868	2,281

Sumber : Hasil olah data, 2020

Dari tabel 4.4 diatas diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung)

sebesar 2.281. dengan nilai du sebesar 1,6708 dan nilai 4-dl sebesar 2,5936. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara 1,6708 dan 2,5936, yakni  $1,6708 \leq 2,281 \leq 2,5936$  maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi.

### 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari komisararis independen, komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Model	nstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,624	,134		-4,644	,000
X1	1,288	,219	,704	5,875	,000
X2	,098	,028	,424	3,549	,001
X3	,114	,228	,056	,502	,618

Sumber : Hasil olah data, 2020

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = -0,624 + 1,288 X_1 + 0,098 X_2 + 0,114 X_3$$

Dari persamaan regresi diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif antara  $X_1$  dengan Y, terdapat hubungan positif antara  $X_2$  dengan Y, dan terdapat hubungan positif antara  $X_3$  dengan Y. Dengan demikian dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,624 menyatakan bahwa besarnya Y adalah - 0,624

dengan asumsi bahwa  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  bernilai konstan.

2. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 1,288 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_1$  akan meningkatkan  $Y$  yaitu sebesar 1,288.
3. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,098 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_2$  akan meningkatkan  $Y$  sebesar 0,098.
4. Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0,114 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_3$  akan meningkatkan  $Y$  yaitu sebesar 0,114.

## 6. Uji Parsial (Uji-t) Model I

Uji statistik  $t$  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji  $t$  ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial variabel terikat secara individual terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji  $t$ -test adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

$H_0 : b_a = 0$  Tidak ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

$H_a : b_a \neq 0$  Ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai  $p$ -value hasil uji- $t$  dari variabel komisaris independen sebesar 0,000. Dikarenakan nilai  $p$ -value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak; yang berarti ada pengaruh komisaris independen terhadap ROA.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap ROA

$H_0 : b_a = 0$  Tidak ada pengaruh Komite Audit terhadap ROA  $H_a : b_a \neq 0$  Ada pengaruh Komite Audit terhadap ROA

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai  $p$ -value hasil uji- $t$  dari variabel komite audit sebesar 0,001. Dikarenakan nilai  $p$ -value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,001 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak; yang berarti ada pengaruh komite audit terhadap ROA.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA

$H_0 : b_a = 0$  Tidak ada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA

$H_a : b_a \neq 0$  Ada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA Berdasarkan

dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,618. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,618 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima; yang berarti tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ROA.

## 7. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan pada model penelitian yang telah dilakukan (Hadi, 2016). Hasil uji F ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,518	3	,173	12,268	,000 <sup>b</sup>
Residual	,620	44	,014		
Total	1,138	47			

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig. sebesar 0,000. Dikarenakan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model signifikan atau model ini memiliki tingkat kesalahan yang rendah.

## 8. Koefisien Determinasi Model

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel Berikut:

**Tabel 4.8**  
**Koefisien Determinasi Model**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R. Error of the Estimate
1	,675 <sup>a</sup>	,455	,418	,11868

Sumber : Hasil olah data, 2020

Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan melihat nilai *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,455 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel independen terhadap *Return on Asset* (ROA) adalah sebesar 45,5% sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dengan adanya proporsi dewan komisaris independen yang tinggi maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi proporsi untuk dewan komisaris independen maka komisaris independen akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa komisaris independen dapat berpikir lebih obyektif dibanding dewan komisaris dan direksi karena komisaris independen.

Semakin banyak pemonitor akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan *agency cost*. Pengawasan komisaris terhadap manajemen umumnya tidak efektif dikarenakan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis, kandidat dewan komisaris sering dipilih sendiri oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani mengkritik kebijakan manajemen.

Dalam menjamin terciptanya tata kelola yang baik maka komisaris independen diharuskan mempunyai kredibilitas, profesional, integritas yang baik. Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat

direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, memastikan perusahaan mematuhi hukum perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan di perusahaan, sehingga perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fidiana dan Sulistyowati (2017) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## **2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan serta implementasi dari *good corporate governance*. Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat.

Keberadaan komite audit akan memastikan bahwa perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Dengan demikian maka semakin banyak jumlah komite audit akan mempengaruhi kinerja internal perusahaan sehingga akan membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2013) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Nur (2015) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Pada penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena di Indonesia belum banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup signifikan. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pasar tidak menggunakan informasi mengenai kepemilikan manajemen dalam melakukan penilaian investasi.

Hal ini diduga karena kondisi di Indonesia, dimana proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan masih sangat rendah, sehingga penerapan kepemilikan manajerial untuk membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemilik agar dapat memotivasi manajer dalam melakukan tindakan guna meningkatkan kinerja perusahaan belum dapat berjalan efektif. Rendahnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh pihak manajemen yang menyebabkan pihak manajemen kurang termotivasi dan kinerja manajemen rendah sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyada (2012) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin besar proporsi dewan komisaris independen fungsi pengawasan perusahaan akan terlaksana dengan baik sehingga kinerja keuangan perusahaan juga meningkat.
2. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi proporsi anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun semakin meningkat.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tidak menjamin adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

#### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas, mengambil objek perusahaan barang konsumsi yang *go public* maupun yang belum. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan barang konsumsi yang terdapat di Indonesia.
2. Indikator penelitian ini dapat ditambah dengan indikator GCG yang lainnya seperti : Aktivitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Kepemilikan Institusional. Dapat ditambahkan pula indikator Komite Remunerasi dan Nominasi serta beberapa indikator lain yang dapat digunakan, sehingga hasil penelitian dapat lebih memprediksi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan selain indikator-indikator yang telah diteliti.
3. Sebaiknya menggunakan ukuran kinerja keuangan lainnya selain menggunakan ROA, Periode pengamatan dilakukan lebih dari empat tahun, sehingga dapat melihat kecenderungan pelaporan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arini T, 2015, *Panduan Praktis Menyusun KPI*, Jakarta: Raih Asa Sukses, cetakan ke 2
- Chapra, M.Umer dan Habib Ahmad, *Corporate governance in Islamic banking*, IRTI 2002.
- Effendi, Muh. Arif, 2009 “*The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*”, Jakarta: Salemba Empat
- Faisal, Abdullah, 2004. “*Manajemen Perbankan Teknik Analisis Perbankan*”, Malang: UMM.
- Ghozali, Imam, 2012. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS20*”, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Haji Mas Agung.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin, 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Irham Fahmi, 2010. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mulyadi dan Setiawan, 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen edisi kedua*, Jakarta: Salemba 4.
- Peraturan Menteri BUMN No. Per- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- Moeheriono, 2014. M.Si, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Robert L. Mathis dan Jhon h. Jackson, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryadi Prawirosentono, 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: BPFE.
- , 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta: BPFE.
- Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, 2014. “*Bank & Istitusi Keuangan Non-Bank di Indonesia*”, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yuwono, Sukarno, M. Ichsan, 2002. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## JURNAL

Cahyani, 2009. Nuswandari, *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi

Jensen, M.C. and W.H. Meckling, “*Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*”. Journal of Financial Economic.

Melinda, F.I, dan Bertha S.Sutejo, 2008. “*Interpendensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.7 No.2

Linawati dan Suhaji, 2012. *Pengaruh Motivasi, Kompetensi, Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada Herculon Carpet Semarang*, Jurnal STIE Widya Mangala Semarang.

Murwaningsari, Etty, *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Kontinum*. Univesitas Trisakti.

Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K, 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember,

Prasetyo Widyo Iswara, 2014. *Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis.

Rafrini Amiyulianthy, *Pengaruh Struktur Corporate Governence Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia*, Jurnal Liquidity Vol.1, No.2.

Rian Ikmal Darmawan, 2013. *Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Vinola, Herawaty, *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dan Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.10 N0.2.

Yuli Soesetio, 2007. “*Kepemilikan Manajerial dan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva dan Probabilitas Terhadap Kebijakan Hutang*”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.11 No.3

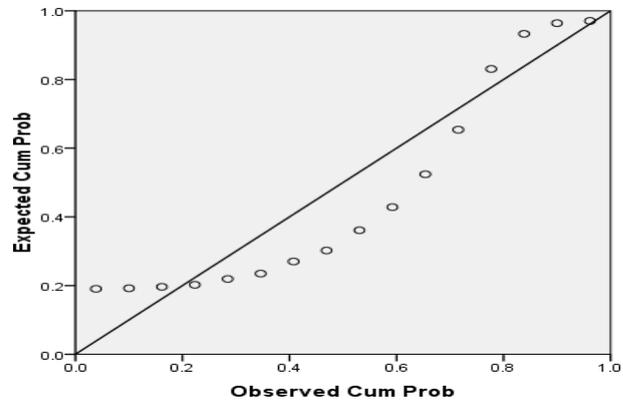
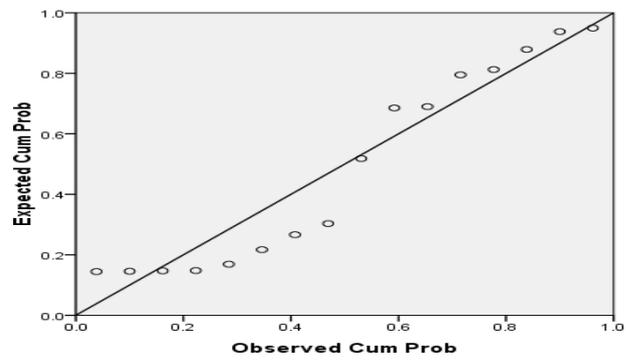
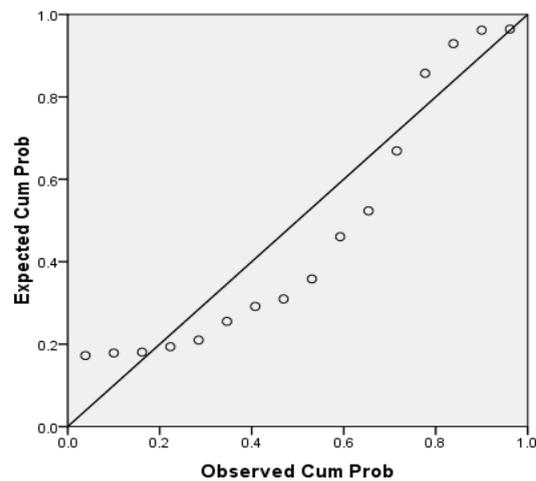
## LAMPIRAN

### LAMPIRAN. 1 UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	1	0,20	0,57	0,3695	0,08503
X2	1	1,00	4,00	2,8750	0,67240
X3	1	0,00	0,34	0,0340	0,07612
ROA	1	-0,11	0,71	0,1381	0,15561
Valid N (listwise)	1				

### LAMPIRAN. 2 UJI NORMALITAS

		X1	X2	X3
N		48	48	48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	11.9250	79.9833	91.9250
	Std. Deviation	2.14479	6.23342	6.60024
Most Extreme Differences	Absolute	.260	.299	.197
	Positive	.156	.225	.145
	Negative	-.260	-.299	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		.236	.331	.282
Asymp. Sig. (2-tailed)		.413	.258	.174

**Gambar 1 Uji Normalitas Variabel X1****Gambar 2 Uji Normalitas Variabel X2****Gambar 3 Uji Normalitas Variabel X3**

#### LAMPIRAN. 4 UJI MULTIKOLONIERITAS

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Komisaris Independen	0,863	1,159	Tidak ada multikolinearitas
Komite Audit	0,866	1,155	Tidak ada multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial	0,996	1,004	Tidak ada multikolinearitas

#### LAMPIRAN 5 UJI AUTOKOLERASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,675 <sup>a</sup>	,455	,418	,11868	2,281

**LAMPIRAN. 6 UJI LINIER BERGANDA**

Model	Nstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,624	,134		-4,644	,000
X1	1,288	,219	,704	5,875	,000
1					
X2	,098	,028	,424	3,549	,001
X3	,114	,228	,056	,502	,618

**LAMPIRAN. 7 UJI F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,518	3	,173	12,268	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	,620	44	,014		
Total	1,138	47			

**LAMPIRAN. 8 UJI KOEFISIEN DETERMINASI MODEL**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate
1	,675 <sup>a</sup>	,455	,418	,11868

**LAMPIRAN. 9 LAPORAN KEUANGAN BANK SUMUT**

NO	Tahun	Data Keungan
1	2014	23.394.821.702.345
2	2015	24.130.113.107.232
3	2016	23.170.043.788.235
4	2017	28.931.823.934.130
5	2018	28.121.107.028.840

Sumber: <https://www.banksumut.co.id/laporan-keuangan-tahunan/>

## CURICULUM VITAE



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Agung Bagus Wibowo
2. NIM : 53154140
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kebun Bangun/ 19 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Jurusan/ Prodi : Perbankan syariah
6. Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
7. Nama Orang Tua  
Ayah : Lasidi  
Ibu : Rehulina Damanik
8. Alamat : Jl. Asahan Km.13 Emplasmen Kebun Bangun
9. Nomer HP : 081397181272
10. E – mail : [agungbw90@gmail.com](mailto:agungbw90@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Tunas Bangsa Kebun Bangun (2002 – 2003)
2. SD : SDN 098917 Desa Bangun (2003 – 2009)
3. SMP : MTsN Siantar (2009 – 2012)
4. SMA : MAN Pematangsiantar (2012 – 2015)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara(2015 – 2021)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FEBI UINSU 2017, sebagai anggota.
2. Honda StreetFire Club (HSFC) Chapter Siantar 2017, sebagai humas.